

GAGASAN NASIONALISME INDONESIA SEBAGAI NEGARA BANGSA DAN RELEVANSI DENGAN KONSTITUSI INDONESIA

Masroer

*Dosen Sosiologi Agama FUSPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UIN Sunan Kalijaga*

Abstrak

Nasionalisme sebagai paham “negara bangsa” tumbuh seiring dengan berakhirnya zaman kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Barat di Dunia Ketiga. Gagasan tentang nasionalisme yang mengilhami munculnya negara-negara baru di seluruh dunia pada abad ke-20 M. Namun di Indoensia, nasionalisme sebagai gagasan negara bangsa mampu berdialog dengan agama, sebagaimana yang ditegaskan oleh Bung Karno yang mampu membangkitkan kesadaran nasionalisme masyarakat Indoensia mnjelang kemerdekaan. Kesadaran nasionalisme ini tidak lahir serta merta, melainkan bersamaan dengan gagasan ideologis yang masuk di tengah perubahan sosial awal abad ke-20 M, seperti Islam yang pernah menjadi alat ideologi yang direpresentasikan dengan lahirnya NU dan Muhammadiyah bersamaan dengan masuknya gelombang pembaharuan agama dari Timur Tengah. Gerakan-gerakan keagamaan ini hendak menumbuhkan Islam sebagai kekuatan nasional yang dapat melawan kolonialisme dan imperialisme. Nasionalisme yang lahir dari agama ini ditangkap ide dan gerakannya oleh Bung Karno sebagai “isme” baru dengan menyebutnya “Islamisme”. Islamisme adalah istilah yang dipakai Bung Karno sendiri untuk menyebut gerakan keagamaan yang melawan kolonialisme di awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Namun gagasan-gagasan ideologis kaum muslimin yang bersifat khusus ini tidak berdiri sendiri, di sisi lain lahir gagasan ideologi sosialis sebagai alat yang mengobarkan semangat masyarakat kecil dalam melawan kolonialisme dan imperialisme. Dan terakhir adalah nasionalisme kaum priyayi yang melandasi bangkitnya sentimen etnik. Bung Karno berhasil mengawinkan ketiga ideologi perlawanan yang semula berjalan sendiri-sendiri ini

untuk bersatu menjadi spirit kebangsaan. Spirit kebangsaan itu melahirkan konsep negara nasionalistik yang berciri pada ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945, integralisme negara (NKRI), dan sistem demokrasi dalam kepemimpinan, hingga sekarang.

Kata kunci; nasionalisme, agama, Bung Karno, Pancasila

A. Pendahuluan

Makalah yang tidak begitu kompleks analisisnya ini ditulis dengan maksud menemukan benang merah gagasan nasionalisme sebagai suatu paham kebangsaan di seluruh dunia dalam konteks mengembangkan konstitusi keindonesiaan sebagai sebuah negara dan bangsa. Harus disadari bahwa dalam konteks sejarah, Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri Negara (*founding fathers*), adalah Indonesia yang tidak berkiblat ke model Barat, atau juga tidak ke Timur Tengah, akan tetapi Indonesia yang hanya bisa dilihat dan dimengerti oleh Indonesia itu sendiri, yakni gagasan Indonesia yang lahir sejak proklamasi kemerdekaan 1945. Namun gagasan Indonesia baru 1945 itu rupanya tidak hanya menceminkan terbentuknya negara baru, tetapi juga lahirnya bangsa baru. Masalahnya yang hendak dipersoalkan adalah sebagai bangsa baru, Indonesia hingga kini belum menemukan jatidirinya. Seperti apakah ciri dan jatidiri bangsa yang baru itu? Di atas dasar apa paham bangsa yang baru itu terbentuk? Apakah dari paham agama, budaya, atau etnik? Kalau dari paham agama, agama seperti apa? Kalau ia dari paham etnis, etnis yang mana, begitu seterusnya? Deretan pertanyaan pelik seperti ini tidak mudah untuk mencari jawabannya.

B. Paham-paham Nasionalisme

Nasionalisme sebagai paham “negara bangsa” tumbuh seiring dengan berakhirnya zaman kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Barat di Dunia Ketiga. Gagasan tentang nasionalisme yang mengilhami munculnya negara-negara baru di seluruh dunia pada abad ke-20 M., dapat dikelompokkan ke dalam enam karakteristik nasionalisme, yaitu:

1) Munculnya negara nasionalisme berciri kewarganegaraan atau

disebut *nasionalisme sipil*. Paham nasionalisme ini lahir ketika negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyat, atau bertumpu pada kebenaran “kehendak rakyat” dan “perwakilan politik”. Gagasan nasionalisme ini mula-mula dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam teori kontrak sosial mengenai masyarakat.

- 2) Munculnya negara nasionalisme berciri etnis, yaitu gagasan nasionalisme ketika negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis tertentu di masyarakat. Paham nasionalisme ini dikembangkan oleh Johann Gottfried von Herder, yang memperkenalkan konsep *Volk* (untuk rakyat).
- 3) Munculnya negara nasionalisme berciri romantik atau disebut *nasionalisme organik* atau *nasionalisme identitas*. Paham nasionalisme romantik merupakan lanjutan dari nasionalisme etnis ketika negara memperoleh kebenaran politik secara *alami* hasil dari pengumpulan suku bangsa atau ras. Nasionalisme romantik bergantung pada perwujudan budaya etnis yang menempati idealisme romantik; melahirkan kisah tradisi masa lalu yang direka untuk membangun konsep nasionalisme romantik, seperti “Grimm Bersaudara” yang diceritakan oleh Herder sebagai koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman.
- 4) Munculnya negara nasionalisme berciri budaya, yakni sejenis gerakan nasionalisme ketika negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukan “sifat keturunan” seperti warna kulit, ras dan sebagainya. Sebagai contoh adalah rakyat Tiongkok yang menganggap negara sebagai dasar kebudayaan. Dalam hal ini unsur ras telah dibelakangkan, seperti golongan Manchuria dan ras-ras minoritas lain yang dianggap sebagai rakyat Tiongkok. Kesediaan dinasti Qing untuk menggunakan adat istiadat Tiongkok membuktikan keutuhan budaya Tiongkok. Banyak rakyat Taiwan menganggap diri sebagai nasionalis Tiongkok karena persamaan budaya mereka, namun menolak bergabung dengan Cina yang berpaham komunis.
- 5) Munculnya negara nasionalisme berciri negara, yaitu merupakan paham nasionalisme kewarganegaraan yang digabungkan dengan nasionalisme etnis. Rasa nasionalisme memberi keutamaan dalam mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan ‘nation state’

lahir dari keunggulan bangsa. Sebagai contoh adalah Nazisme, dan nasionalisme Belgia, yang secara tegas menentang terwujudnya hak kesetaraan (*equal rights*). Secara sistematis, jika nasionalisme negara kuat, akan melahirkan konflik pada kesetiaan masyarakat dan wilayah, seperti nasionalisme Turki dan penindasan terhadap nasionalisme Kurdi.

- 6) Munculnya negara nasionalisme berciri agama, yakni adalah jenis nasionalisme ketika negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama, seperti nasionalisme etnis yang dicampur dengan agama tertentu. Misalnya yang ada di Irlandia semangat nasionalisme bersumber dari Gereja Katolik dan nasionalisme di India, seperti yang dilakukan partai BJP yang bersumber dari Hinduisme, dan juga nasionalisme di Iran dengan Islam Syiahnya.

C. Karakteristik Nasionalisme Indonesia.

Sebagai negara merdeka, Indonesia merupakan entitas baru yang lahir dari pergolakan melawan imperialisme dan kolonialisme. Ketika imperialisme dan kolonialisme menginjakkan kakinya di bumi Nusantara, keindonesian sebagai entitas baru belum ada. Ia hanyalah negeri yang terdiri dari gugusan pulau yang dipisahkan oleh lautan; membentang dari barat, di Aceh sampai ke timur Papua. Gugusan pulau itu dikenal dengan nama Nusantara. Posisi wilayahnya yang strategis dan subur dengan kekayaan alamnya yang melimpah, terletak di sebelah selatan Asia Tenggara dengan pegunungannya yang aktif, dan sebelah utara dengan lautan Samudera Hindia memancing bangsa-bangsa asing singgah. Gugusan pulau ini dihuni baratus-ratus suku yang memeluk agama yang berbeda, bahasa yang berbeda dan bahkan budaya yang berbeda meskipun memiliki corak masyarakat yang sama, yaitu tradisionalisme; hidup dalam adat istiadat dan tradisi yang diwariskan leluhur. Selain ciri tradisionalisme, struktur sosial Nusantara yang dikepalai oleh raja atau kepala suku yang mendiami pulau-pulau itu memiliki pengaruh besar dalam memimpin masyarakatnya. Para raja dan kepala suku itu lahir dari ikatan sosial kekerabatan, menjadi simbol pengikat masyarakat komunal dalam mengembangkan solidaritas sosialnya. Oleh karena itu mereka diteladani dan menjadi model dalam bertingkah laku. Dulu, para raja dan kepala suku itu tidak dipilih, tetapi kepemimpinan itu diwariskan turun temurun membentuk

dinasti-dinasti lokal yang dalam keadaan tertentu dapat saling berperang memperebutkan kekuasaan atas tanah dan ekonomi. Kondisi ini yang membuat Nusantara tidak hidup dalam kesatuan geopolitik. Baru setelah kehadiran bangsa-bangsa asing, kesatuan geopolitik mulai terbentuk. Pada mulanya mereka berdagang dengan para raja dan kepala suku, kemudian membangun kongsi dagang di masing-masing daerah. Dan akhirnya untuk melindungi kongsi dagangnya, mereka membangun kekuatan militer dan politik sehingga terbentuk pemerintahan modern di daerah jajahannya yang kemudian dikenal dengan nama Indonesia. Zaman kolonialisme berlangsung selama berabad-abad; menciptakan masyarakat pribumi sebagai kelas tiga dalam piramida sosial pra-Indonesia, setelah Cina dan Eropa.

Pemerintahan kolonial yang berkuasa cukup lama ini di satu sisi menciptakan warna baru, modernisasi pengelolaan negara, kelembagaan pendidikan yang berorientasi kerja, dan industrialisasi ekonomi terutama kehadiran pabrik-pabrik gula, karet dan modernisasi alat transportasi, seperti kereta api dan mobil yang sebelumnya hanya menggunakan transportasi kuda dan gerobak/kereta. Situasi ini telah menghasilkan perubahan positif. Namun di sisi lain, era kolonialisme juga menimbulkan kerugian. Sebab era kolonialisme yang dekat dengan kapitalisme ini pada dasarnya hanya mencari keuntungan ekonomi, dan mengeksploitasi sumber daya alam yang dapat diperdagangkan untuk kepentingan kolonial sendiri.

Menyadari situasi itu, Bung Karno menawarkan gagasan baru tentang Indonesia merdeka. Gagasan yang diusungnya lahir dari sentimen anti kolonialisme dan imperialisme yang bertujuan membangkitkan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan sebuah bangsa. Melalui analisisnya yang tajam mengenai segi negatif kolonialisme dan imperialisme, Bung Karno berhasil membangkitkan kesadaran nasionalisme masyarakat. Kesadaran nasionalisme ini tidak lahir serta merta, melainkan bersamaan dengan gagasan ideologis yang masuk di tengah perubahan sosial awal abad ke-20 M, seperti Islam yang pernah menjadi alat ideologi yang direpresentasikan dengan lahirnya NU dan Muhammadiyah bersamaan dengan masuknya gelombang pembaharuan agama dari Timur Tengah. Gerakan-gerakan keagamaan ini hendak menumbuhkan Islam sebagai kekuatan nasional yang dapat melawan kolonialisme dan imperialisme. Nasionalisme yang lahir

dari agama ini ditangkap ide dan gerakannya oleh Bung Karno sebagai “isme” baru dengan menyebutnya “Islamisme”. Islamisme adalah istilah yang dipakai Bung Karno sendiri untuk menyebut gerakan keagamaan yang melawan kolonialisme di awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Namun gagasan-gagasan ideologis kaum muslimin yang bersifat khusus ini tidak berdiri sendiri, di sisi lain lahir gagasan ideologi sosialis sebagai alat yang mengobarkan semangat masyarakat kecil dalam melawan kolonialisme dan imperialisme. Dan terakhir adalah nasionalisme kaum priyayi yang melandasi bangkitnya sentimen etnik. Bung Karno berhasil mengawinkan ketiga ideologi perlawanan yang semula berjalan sendiri-sendiri ini untuk bersatu menjadi spirit kebangsaan. Spirit kebangsaan itu melahirkan konsep negara nasionalistik yang berciri pada ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945, integralisme negara (NKRI), dan sistem demokrasi dalam kepemimpinan, hingga sekarang.

D. Agama dan Nasionalisme

Agama dan nasionalisme perlu disejajarkan kedudukannya sebab keduanya secara politik sangat penting dalam memperkuat kehidupan bernegara. Karena itu tidak salah jika dikatakan Indonesia dibentuk sebagai negara yang dijiwai oleh agama-(agama) dan nasionalisme. Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat ketika pola pikirnya mulai melemah. Ikatan ini terjadi saat manusia hidup bersama dan menetap dalam wilayah tertentu. Pada saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka mempertahankan negeri dan tempat menggantungkan diri, terutama ketika ancaman dari luar datang.

Pada zaman modern, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentraman yang berlandaskan nasionalisme etnik dan agama. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrem seperti Nazi-isme, dan sebagainya. Namun saat ini, agama dapat menjadi “candu” masyarakat. Dalam memahami Islam sebagai agama kemanusiaan, hal itu tidaklah mudah dan kemungkinan dapat dianggap sebagai kesesatan. Agama lebih mudah dihayati sebagai doktrin yang keras sehingga dapat melunturkan rasa nasionalisme terhadap negara

dan bangsa.

Di Indonesia, perdebatan antara kelompok nasionalis dengan agama tidak kunjung selesai. Keduanya bertarung memperebutkan kebenaran politik. Para sejarawan cenderung menelusuri pertarungan itu sejak Piagam Jakarta, tetapi ada yang mengambil klaim lebih jauh hingga pertarungan dalam tubuh Sarekat Islam tahun 1910-an. Beberapa studi sejarah mengenai hal itu, memunculkan anggapan bahwa dalam pertarungan itu, kelompok nasionalis menjadi pemenang. Klaim ini mungkin benar, tetapi pada beberapa kasus, kemenangan kelompok nasionalis bukannya tanpa syarat. Terdapat banyak contoh mengenai pergumulan politik di Indonesia yang telah menghasilkan kultur politik hibrida dengan mencampurkan ide-ide yang secara prinsip memiliki perbedaan (Didi 2015 www.newhistorian.wordpress.com).

Dengan kata lain, kepentingan “kelompok agama” juga membaur didalamnya. Adanya kultur hibrida ini menyiratkan konstruksi religiusitas di Indonesia mengalami proses modifikasi. Dalam arti agama yang datang tidak pernah “*taken for granted*”, melainkan mengalami adaptasi dan akulturasi terhadap budaya di mana agama itu tumbuh. Dalam konteks politik, hal ini tampak ketika muncul ide-ide nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial yang menjadi tren di seantero dunia, dan agama melibatkan diri untuk hal itu (Didi 2015 www.newhistorian.wordpress.com).

Problem ketegangan ini sebenarnya telah dirasakan oleh para pemikir muslim di Indonesia. Hasilnya, lahir pemikiran yang menyebutkan nasionalisme dan agama memiliki kepentingan paralel dan tidak bertentangan (Didi 2015 www.newhistorian.wordpress.com). Problem fenomena perilaku orang kota di Indonesia akhir-akhir ini yang merasa sebagai orang Islam, misalnya berkaitan dengan sistem pendidikan yang tidak mampu menguatkan sentimen kebangsaan. Semangat agama sebagai bagian pandangan hidup dipersepsikan menjadi sesuatu yang salah dan bertentangan dengan prinsip kebangsaan. Karena identitas agama dipersepsikan dalam bentuk penampilan dan simbol, bukan nilai sakral, atau sebatas identitas agama yang dipraktekkan secara berlebihan sehingga memancing terjadinya konflik (Aldira 2011).

Masalah konflik identitas agama dan kebangsaan menjadi sesuatu yang biasa bagi sebagian negara, namun masalah itu seharusnya tidak bagi Indonesia karena dua alasan, *pertama* adanya landasan historis perjuangan bangsa dan *kedua* adalah

falsafah (pandangan dunia) Pancasila (Aldira 2011). Landasan pertama adalah landasan historis, yaitu sejarah perjuangan kebangsaan, ketika semangat kebangsaan dan agama berkaitan erat. Seperti berkobarnya pertempuran di Surabaya, pada saat itu Bung Tomo yang menggelorakan semangat jihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan tokoh-tokoh ulama yang juga mendapat gelar pahlawan nasional, seperti KH Achmad Dahlan, KH Hasyim Asy'ari, dan HOS Tjokroaminoto, ataupun KH Agus Salim. Dari perjalanan hidup tokoh-tokoh itu sangat jelas mereka sosok yang mensinergikan identitas kebangsaan dengan agama. Identitas kebangsaan dipupuk dengan motivasi keagamaan, sehingga lahir semboyan cinta tanah air bagian dari keimanan (Aldira 2011). Belum lagi catatan sejarah jika mengurai keterlibatan agama Hindu di Bali dalam perang revolusi kemerdekaan dan juga agama-agama lain, seperti Gereja Katholik dan Protestan di masa awal kemerdekaan Indonesia.

Landasan kedua adalah landasan filosofis Pancasila yang idealnya senantiasa dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Butir-butir Pancasila tidak membenturkan antara identitas agama dengan kebangsaan. Pancasila justru mensinergikannya. Falsafah Pancasila menjadikan landasan agama sebagai identitas pokok kebangsaan, seperti pada sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang menegaskan identitas kebangsaan Indonesia dilandasi oleh aktivitas religius. Dan dari sila pertama ini menjelaskan prinsip-prinsip ketuhanan menjadi bagian dari pedoman hidup dalam bernegara dan berbangsa (Aldira 2011).

Berdasarkan prinsip Pancasila, nilai-nilai agama memungkinkan menjadi referensi dalam perundang-undangan selama ia menjadi konsensus nasional yang diterima secara konstitusi. Identitas agama dalam arti nilai pedoman hidup sangat penting, menjadin benteng dari sikap amoral, dan menjadi landasan spiritual. Bahkan apabila melihat kembali perjalanan hidup pahlawan nasional, agama merupakan spirit utama dalam mempertahankan kedaulatan bangsa (Aldira 2011). Jika nilai-nilai luhur agama (agama) dapat memperkuat butir-butir Pancasila, maka sinergitas identitas agama dengan nasionalisme menemukan titik temunya. Khususnya dalam memperjuangkan tegaknya keadilan, persatuan, demokrasi dan kemanusiaan di Indonesia sebagaimana yang termaktub dengan jelas dalam butir-butir Pancasila. Pertanyaanya kemudian, sejauhmana filosofi Pancasila itu terkandung dalam

kontitusi dasar negara dalam menghadapi tantangan zamannya? Dan adakah pemerintahan yang kuat yang dapat mengawalinya? Wallahu A'lamu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Alawi, *Agama dan Nasionalisme*, dalam <http://www.nu.or.id>. Diunduh 22 Sepetmber 2015.
- Ali, Fachry, dan Bahtiar Effendy. *Merambah Jalan Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1992.
- Azis, M. Imam, dkk. *Membangun Budaya Kerakyatan; Kepemimpinan Abdurrahman Wahid Dan Gerakan SosialNU*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Basalim, Umar. *Pro Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002.
- Baswir, Revrison. "Strategi Membangun Ekonomi Kerakyatan" dalam Kiswondo, dkk. (ed.), *Politik Ekonomi Indonesia Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Benda, Harry J, dkk, (eds.). *Japanes Administration in Indonesia: Selected Documents*. New Haven, Conn, 1965.
- Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Penduduk Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Berton, Greg. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Aburrahmanan Wahid*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Booth, Anne, dan Peter McCawley (peny.). *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 1981.
- Didi, *History-Social-Culture* dalam www.newhistorian.wordpress.com, Diunduh 22 September 2015.
- Feith, Hebert. *Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Frederick, William H., dan Soeri Soeroto. *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES, 1982.

- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: ISAI, 2001.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hirokoshi, Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1987.
- Huntington, Samuel P. *Tertib Politik di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Ichwan, Moch Nur, and Noorhaidi Hasan.(ed). *Moving with the Time: the Dynamics of Contemporary Islam in a Changing Indonesia*. Yogyakarta: Cisfrom UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Muhammad Aldhira, *Agama dan Nasionalisme*, Opini Harian Republika 18-Juni-2011 dalam <http://aldhira.wordpress.com>. Diunduh 22 September 2015.
- Manuel Castells, *The Power of Identity*, USA: Blackwell Publishing, 2003
- Masroer Ch Jb., dkk. *Demi Ayat Tuhan: Upaya KPPSI dalam menegakkan Syariat Islam*, Jakarta, OPSI, 2014